

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

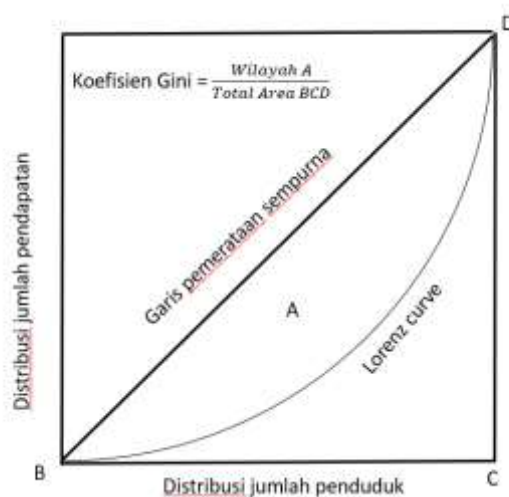
2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat (Todaro & Smith, 2006, dalam Gurusinga et al., 2022). Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 1999, dalam Dinas Komunikasi dan Informatika & Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2018: 26).

Pengukuran ketimpangan pendapatan yang umum digunakan dalam penelitian adalah pengukuran kurva Lorenz yang dijelaskan secara matematis oleh koefisien gini. Kurva Lorenz merupakan grafik yang menunjukkan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau wilayah. Grafik ini mengilustrasikan sejauh mana pendapatan atau kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu dalam masyarakat. Kurva Lorenz menggambarkan ukuran dari distribusi pendapatan dari pemerataan yang sempurna dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (pemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurva Lorenz (Todaro & Smith, 2020).

Dalam kurva Lorenz pada gambar 2.1, sumbu horizontal menggambarkan proporsi penerima pendapatan dalam bentuk persentase kumulatif hingga 100%. Adapun sumbu vertikal menunjukkan persentase pendapatan total yang diterima oleh kelompok penduduk tersebut, juga secara kumulatif sampai 100%, sehingga kedua sumbu memiliki Panjang yang sebanding. Sebuah garis diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas merepresentasikan kondisi ketika setiap persentase penduduk memperoleh porsi pendapan yang sama (pemerataan sempurna). Kurva Lorenz kemudian memperlihatkan bagaimana pendapatan sebenarnya terdistribusi, yaitu hubungan antara persentase penduduk dan bagian pendapatan yang mereka terima pada suatu periode tertentu. Semakin jauh lengkungan kurva Lorenz dari garis diagonal tersebut, semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan (Todaro & Smith, 2020).



Sumber: *Economic Development 12th Edition*

Gambar 2. 1 Kurva Lorenz

Ukuran ringkas untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio antara luas area yang berada

di antara garis diagonal dan kurvan Lorenz dengan luas keseluruhan setengah persegi tempat kurva tersebut berada. Rasio ini dikenal sebagai koefisien Gini.

Koefisien Gini merupakan ukuran agregat ketimpangan, dengan nilai yang berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menggambarkan ketimpangan sempurna. Pada ukurannya, ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi biasanya memiliki koefisien Gini antara 0,50 hingga 0,70, sedangkan dikatakan distribusi pendapatannya relative merata berada pada kisaran 0,20 hingga 0,35. Nilai koefisien Gini diantara tinggi dan rendah (sekitar 0,35 sampai 0,50) menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup besar (Todaro & Smith, 2020).

2.1.2 Teori

2.1.2.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Dalam kerangka pembangunan ekonomi, Todaro & Smith (2020) menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peningkatan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai proses multidimensional yang juga mencakup bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi di dalam masyarakat. Dengan demikian, distribusi pendapatan menjadi aspek fundamental dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi pemerataan justru berpotensi memperbesar ketimpangan pendapatan.

Pembangunan dapat disimpulkan sebagai suatu realitas fisik sekaligus keadaan mental, di mana suatu masyarakat, melalui kombinasi proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan, berhasil memperoleh sarana untuk mencapai

kehidupan yang lebih baik. Todaro & Smith (2020) menjelaskan bahwa pembangunan setidaknya memiliki tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan ketersediaan serta pemerataan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan pendidikan, serta memperluas pilihan ekonomi dan sosial masyarakat dengan mengurangi ketergantungan dan kemiskinan. Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, distribusi pendapatan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan tersebar di dalam masyarakat. Distribusi pendapatan menggambarkan disparitas atau ketimpangan dalam pembagian hasil pembangunan, baik antarindividu maupun antarwilayah (Hakiki, F.M., & Hayati, B., 2015, dalam Amalia et al., 2022). Semakin besar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, semakin menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum terdistribusi secara merata.

Fenomena ketimpangan distribusi pendapatan ini juga dijelaskan dalam teori Pareto (1906, dalam Ramdani, 2024) yang menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian terdapat kecenderungan bahwa sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar masyarakat lainnya hanya memperoleh bagian yang relatif kecil. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak merata dan memunculkan kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, pembangunan ekonomi pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan output atau pendapatan nasional, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata dan ketimpangan pendapatan dapat ditekan.

2.1.2.2 Teori Redistribusi Pendapatan

Berdasarkan teori kebijakan redistribusi Rosen & Gayer (2018) redistribusi pendapatan merupakan peran pemerintah untuk memperbaiki distribusi pendapatan yang terbentuk melalui mekanisme pasar. Ketimpangan pendapatan tidak hanya dipandang sebagai persoalan keadilan, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan sosial secara keseluruhan, karena tingkat ketimpangan dapat memengaruhi kesejahteraan individu di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berperan melakukan intervensi melalui kebijakan publik, khususnya melalui pengeluaran pemerintah, untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah. Dalam konteks penelitian ini, belanja bantuan sosial dipandang sebagai instrumen kebijakan redistribusi yang bertujuan memperbaiki distribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat.

Selain itu, teori tersebut juga menekankan bahwa kebijakan redistribusi berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang rentan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Thomas Hobbes dalam Rosen & Gayer (2018) yang menyatakan bahwa

individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tidak seharusnya hanya bergantung pada bantuan sukarela masyarakat, tetapi perlu dijamin melalui kebijakan negara. Dengan demikian, belanja bantuan sosial dapat diposisikan sebagai instrumen negara untuk melindungi kelompok miskin dan rentan serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Peningkatan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah melalui kebijakan bantuan sosial tersebut pada akhirnya diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat, sehingga hubungan antara belanja bantuan sosial dan ketimpangan pendapatan secara teoritis bersifat negatif, di mana semakin besar alokasi belanja bantuan sosial maka semakin kecil tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi.

2.1.2.3 Teori Desentralisasi Fiskal

Dasar teori desentralisasi fiskal di kemukakan oleh Hayek, Musgrave dan Oates dalam Puspita et al., (2021: 7) yang mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan, mengelola penerimaan dan pengeluaran yang terdesentralisasi akan lebih efisien dari sisi ketersediaan informasi dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah memiliki pengetahuan lebih baik tentang daerahnya dibandingkan pemerintah pusat yang menjadikan dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan barang dan jasa lebih efisien, atau dikenal dengan istilah efisiensi alokasi. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku pemerintah daerah dipengaruhi oleh penerapan desentralisasi fiskal. Apabila pemerintah pusat dibatasi dalam mengelola pelaksanaan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola perekonomian daerah.

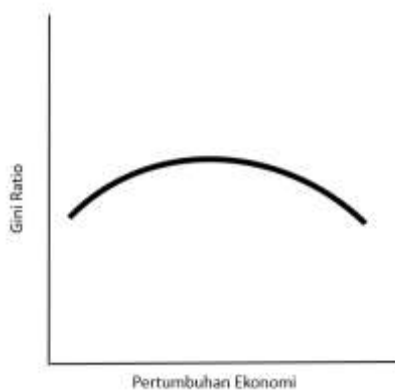
Pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Litvack dan Seddon (1998, dalam Puspita et al., 2021: 7-8), yaitu pendekatan penerimaan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan komprehensif. Pendekatan penerimaan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sekaligus memperoleh bagian tertentu dari penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari daerah. Pendekatan pengeluaran memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pengeluaran daerah yang dibiayai dari berbagai sumber penerimaan, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dari transfer pemerintah pusat. Sementara itu, pendekatan komprehensif merupakan pendekatan yang menyelaraskan potensi penerimaan daerah dengan kebutuhan pengeluaran daerah, sehingga kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran diserahkan secara bersamaan kepada pemerintah daerah.

Dalam kaitannya dengan ketimpangan pendapatan, penerapan desentralisasi fiskal yang tercermin melalui tingginya derajat desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kewenangan fiskal yang lebih besar, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pembangunan, pelayanan publik, serta program kesejahteraan masyarakat yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Kondisi tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat

terhadap layanan dasar, meningkatkan kesempatan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat.

2.1.2.4 Teori Kuznets

Pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan menurut Kuznets, dalam Todaro & Smith (2020) mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, tingkat ketimpangan pendapatan cenderung meningkat terlebih dahulu, dan baru akan mengalami perbaikan pada tahap perkembangan selanjutnya. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets berbentuk “U terbalik”, karena berdasarkan pengamatan Kuznets, perubahan distribusi pendapatan yang diukur melalui koefisien gini dalam analisis runtut waktu tampak membentuk pola menyerupai huruf U terbalik seiring dengan meningkatnya pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.2.



Sumber: *Economic Development 12th Edition*

Gambar 2. 2 Kurva Kuznets

Pada tahap ini, aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor modern yang memiliki tingkat produktivitas dan upah lebih tinggi, sementara

sebagian besar tenaga kerja masih terserap di sektor tradisional dengan produktivitas yang relatif rendah.

Fenomena tersebut sering terjadi di negara berkembang karena proses industrialisasi dan modernisasi ekonomi berlangsung secara bertahap dan tidak merata antarwilayah maupun antarsektor. Pertumbuhan ekonomi awal biasanya lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap modal, pendidikan, dan teknologi, sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Sementara itu, kemampuan sektor modern dalam menyerap tenaga kerja masih terbatas, sehingga manfaat pertumbuhan belum dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Seiring dengan berjalannya pembangunan dan meluasnya sektor modern, kesempatan kerja dan akses terhadap pendidikan mulai meningkat. Pada tahap selanjutnya, peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan berkurangnya ketergantungan pada sektor berproduktivitas rendah menodorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan di negara berkembang cenderung meningkat pada fase awal pertumbuhan ekonomi, sebelum kemudian menurun pada tahap pembangunan yang dikenal sebagai kurva Kuznets berbentuk “U terbalik”.

Namun demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak bersifat otomatis. Dalam konteks negara berkembang, arah dan besarnya ketimpangan sangat dipengaruhi oleh karakteristik struktur ekonomi, kebijakan pemerintah, serta kemampuan institusi dalam mengelola proses pembangunan.

2.1.2.5 Teori Kapabilitas

Teori kapabilitas (*capability approach*) merupakan salah satu kerangka teoritis yang paling berpengaruh dalam studi pembangunan manusia dan kebijakan sosial. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Amartya Sen, seorang ekonomi dan filsuf asal India yang meraih penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 1998 atas kontribusinya terhadap teori kesejahteraan ekonomi dan pembangunan manusia. Todaro & Smith (2020) menjelaskan bahwa Amartya Sen berpendapat bahwa "*capability to function*" atau kemampuan untuk berfungsi adalah hal yang sesungguhnya menentukan status miskin atau tidak miskin seseorang, di mana sebagaimana dikutip dari Sen, "*Economic growth cannot be sensibly treated as an end in itself. Development has to be more concerned with enhancing the lives we lead and the freedoms we enjoy.*" Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan pendapatan, melainkan dari sejauh mana kebebasan dan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna dapat terwujud.

Inti dari teori kapabilitas Sen terletak pada konsep *functionings* dan *capabilities* sebagai dua elemen yang saling berkaitan. Todaro & Smith (2020) menjelaskan bahwa *functionings* adalah apa yang seseorang lakukan atau dapat lakukan dengan komoditas yang dimilikinya, sementara *capabilities* didefinisikan sebagai "*the freedom that a person has in terms of the choice of functionings, given his personal features and his command over commodities*". Dengan kata lain, kapabilitas adalah kebebasan nyata yang dimiliki seseorang untuk memilih dan

menjalani cara hidup yang ia nilai, yang sangat dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya dan kondisi lingkungan di sekitarnya.

Lebih lanjut, Sen dalam Todaro & Smith (2020) menegaskan bahwa kesejahteraan manusia (*well-being*) dalam pengertian yang sesungguhnya berarti *"being healthy, well nourished, well clothed, literate, and long-lived and more broadly, being able to take part in the life of the community, being mobile, and having freedom of choice in what one can become and can do."* Aspek mobilitas yang disebutkan Sen dalam definisi kesejahteraan ini menjadi titik temu antara teori kapabilitas dan peran infrastruktur panjang jalan. Iswahyudi & Asnawi (2024) menjelaskan bahwa penelitian yang berpijak pada teori kapabilitas Sen mendorong agar fokus kebijakan sosial lebih ditekankan pada upaya peningkatan kapabilitas untuk mengurangi ketidaksetaraan, yang berarti setiap kebijakan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, harus dievaluasi dari sejauh mana ia mampu memperluas kapabilitas kelompok yang paling dirugikan oleh ketimpangan.

2.1.3 Belanja Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012, belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena

alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Bentuk belanja bantuan sosial terdiri atas bantuan sosial yang bersifat konsumtif, bantuan sosial yang bersifat produktif, dan bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga tertentu. Belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman sosial. Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah. Pembayaran belanja bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga tertentu dilakukan melalui transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa (Dharmakarja, 2017).

Manfaat yang akan dicapai dari belanja bantuan sosial dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 81/PMK.05/2012, yang menjelaskan bahwa tujuan dari belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitas sosial, untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
2. Perlindungan sosial, untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal
3. Pemberdayaan sosial, merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

4. Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
5. Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan
6. Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Faktor-faktor penentu dari besaran belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut (Praptiningsih, 2017):

1. Opini audit

Opini audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah, yang diperoleh melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Opini audit diukur berdasarkan derajat opini dari kualitas terendah hingga tertinggi, yaitu *disclaimer* (5), tidak wajar (4), wajar dengan pengecualian (3), wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas (2), dan wajar tanpa pengecualian (1). Opini audit berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial, karena semakin baik opini audit yang diperoleh pemerintah daerah mencerminkan semakin tingginya kualitas tata kelola keuangan, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Kondisi tersebut meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di hadapan pemangku kepentingan, baik

pemerintah pusat, legislatif daerah, maupun masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi fiskal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan legitimasi dan kepercayaan yang lebih tinggi, pemerintah daerah memiliki ruang kebijakan yang lebih besar untuk merencanakan dan merealisasikan program-program yang bersifat strategis dan sensitif, termasuk peningkatan alokasi belanja bantuan sosial sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat.

2. Ukuran pemerintah daerah

Total pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah digunakan sebagai proksi ukuran pemerintah daerah, yang diukur berdasarkan total pendapatan daerah. Ukuran pendapatan daerah yang lebih besar mencerminkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang relatif lebih baik. Semakin besar ukuran pendapatan suatu pemerintah daerah, semakin tinggi pula tingkat perhatian dan tekanan publik terhadap akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan tekanan publik tersebut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan praktik pengungkapan dalam laporan keuangan, sekaligus memperkuat tuntutan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah cenderung mengungkapkan informasi yang bersifat *good news* sebagai sinyal kinerja yang baik, salah satunya melalui realisasi dan pelaporan belanja bantuan sosial yang menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan jumlah transfer pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, yang diukur berdasarkan total pendapatan transfer dari pemerintah. Dana perimbangan yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berpengaruh positif terhadap pengungkapan dan realisasi belanja bantuan sosial di pemerintah daerah, karena transfer tersebut disertai dengan tuntutan pengawasan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang lebih tinggi dari pemerintah pusat sebagai pemberi dana. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan secara lebih rinci penggunaan anggaran, khususnya pada pos belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti belanja bantuan sosial. Secara teoritis, fenomena *flypaper effect* menjelaskan bahwa transfer dari pemerintah pusat cenderung melekat pada belanja publik daerah, sehingga peningkatan dana perimbangan lebih banyak diterjemahkan ke dalam peningkatan belanja pemerintah daerah dibandingkan peningkatan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Oleh karena itu, semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah, semakin besar pula kecenderungan peningkatan alokasi dan realisasi belanja bantuan sosial sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah merupakan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial, karena PAD mencerminkan kapasitas fiskal riil yang berasal dari kontribusi masyarakat dan dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah. Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, semakin luas pula ruang fiskal yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan publik, termasuk belanja bantuan sosial. Dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengalokasikan anggaran serta tanggung jawab yang lebih besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga cenderung mampu mengalokasikan belanja bantuan sosial dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang rendah.

5. Faktor Kependudukan

Faktor kependudukan, khususnya jumlah penduduk miskin dan tingkat kepadatan penduduk, menjadi salah satu determinan penting dalam penetapan besaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, sehingga kelompok ini secara langsung menjadi sasaran utama program bantuan sosial. Semakin besar jumlah penduduk miskin di suatu daerah, semakin tinggi pula kebutuhan pemerintah daerah untuk menyediakan program bantuan sosial sebagai instrument perlindungan sosial dan penanggulangan kerentanaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, karakteristik kependudukan yang tercermin dari tingginya kepadatan penduduk juga memperkuat kebutuhan belanja bantuan sosial. Daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi cenderung menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang lebih besar, seperti persaingan akses terhadap lapangan kerja, hunian, serta layanan dasar, sehingga kesenjangan kesejahteraan antarpenduduk menjadi lebih mudah terlihat dan dirasakan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja bantuan sosial guna meredam dampak sosial dari konsentrasi penduduk dan ketimpangan kesejahteraan yang muncul.

2.1.4 Derajat Desentralisasi Fiskal

2.1.4.1 Desentralisasi Fiskal

Landasan penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia bertumpu pada kerangka otonomi daerah, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua regulasi tersebut menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Implementasinya tercermin melalui penyediaan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema transfer ke daerah, guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dengan menekankan pada pemberian disreksi kepada pemerintah daerah untuk membelanjakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, sementara sumber penerimaan

sebagian besar masih dikuasai oleh pemerintah pusat dalam rangka keutuhan berbangsa dan bernegara. Walaupun demikian, pemerintah daerah tetap diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan asli daerah yang diatur dengan undang-undang (Puspita et al., 2021).

2.1.4.2 Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber yang berada dalam kewenangannya sendiri. Indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar kontribusi pendapatan yang diperoleh daerah secara mandiri dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan di daerah. Menurut Purba dan Hutabarat, dalam Yulitawati & Mustika (2020), rasio derajat desentralisasi fiskal juga menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal, menurut Kuncoro (2004, dalam Surgawati, 2021) dapat digunakan rasio antara total pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Sehingga menghasilkan formulasi atau rumus rasio sebagai berikut:

$$\text{derajat desentralisasi fiskal} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total penerimaan daerah}} \times 100\%$$

Angka DDF yang dihitung kemudian diinterpretasikan menjadi 6 kriteria yaitu “Sangat Kurang” jika $0,00\% \leq \text{DDF} \leq 10,00\%$, “Kurang” jika $10,10\% \leq \text{DDF} \leq 20,00\%$, “Sedang” jika $20,10\% \leq 30,00\%$, “Cukup” jika $30,10\% \leq 40,00\%$,

“Baik” jika $40,10\% \leq 50,00\%$, “Sangat Baik” jika $DDF > 50\%$ (Litbang Depdagri 1991 dalam Surgawati, 2021)

2.1.4.3 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Puspita et al., 2021: 99).

a) Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2005, dalam Puspita et al., 2021: 100), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, yaitu pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Jenis pajak

provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus, dan retribusi perjanjian tertentu.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan asli daerah yang berasal dari keuntungan perusahaan daerah (BUMD), hasil divestasi modal pemerintah daerah, atau keuntungan penyertaan modal pada perusahaan swasta, yang merupakan sumber penerimaan daerah selain pajak, retribusi, dan pendapatan sah lainnya.

d) PAD lain-lain yang Sah

PAD lain-lain yang sah adalah komponen PAD yang mencakup pendapatan di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penjualan aset daerah, jasa giro, bunga, tuntutan ganti rugi,

keuntungan selisih kurs, serta komisi atau potongan dari penjualan/pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah.

2.1.4.4 Total Penerimaan Daerah

Total penerimaan daerah adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, yang mencakup pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat/dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut.

a) Dana perimbangan

Dana perimbangan merupakan salah satu jenis transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berfungsi sebagai *equalization grant* yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (horizontal) untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU dihitung berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar adalah komponen total gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah, sementara celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi

(IKK), PDRB per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Kapasitas fiskal daerah dihitung berdasarkan penerimaan PAD dan DBH.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK terbagi menjadi dua kelompok, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

Pengelompokkan ini terjadi dimulai sejak tahun 2016 karena reklasifikasi dan *refocusing* postur dana transfer dalam APBN. DAK Fisik merupakan dana transfer bersifat *matching categorical grant* yaitu transfer yang mensyaratkan pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam jumlah tertentu untuk mendanai bidang/program/kegiatan pembangunan fisik di daerah yang telah ditentukan. Sedangkan DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar public yang semakin berkualitas.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi tertentu untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

b) Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dan dana bantuan keuangan.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan merupakan perubahan yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi di negara tersebut. Adapun dapat didefinisikan teori pertumbuhan ekonomi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jangka Panjang dalam *output* per kapita dan bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi untuk membentuk proses pertumbuhan harus dijelaskan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai berikut (Amalia et al., 2022: 215)

a) Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari tingkat keahlian, pengetahuan, orisinalitas, dan kreativitas yang dimilikinya, serta tingkat pendidikan dan pelatihannya. Pertumbuhan ekonomi akan terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang terampil, sedangkan kelimpahan sumber daya manusia akan berdampak kecil.

b) Sumber Daya Alam

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh kekayaan sumber daya alamnya. Termasuk tanah dan dasar laut, serta sumber daya yang ditemukan di alam. Sumber daya alam suatu negara selaras dengan iklim dan lingkungannya. Dengan kata lain, negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah lebih mungkin untuk tumbuh daripada negara-negara dengan sumber daya yang terbatas.

c) Pembentukan Modal

Bangunan, mesin, dan transportasi adalah contoh aset modal yang berkontribusi pada pembentukan modal dalam perekonomian. Produksi semua barang buatan manusia adalah proses pembentukan modal. Pembentukan modal

dapat meningkatkan ketersediaan modal dalam angkatan kerja dan dapat meningkatkan rasio modal atau tenaga kerja dalam suatu angkatan kerja tertentu. Karena itu, berpotensi untuk meningkatkan *output* dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

d) Pengembangan Teknologi

Pekerja menggunakan berbagai alat teknologi sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Dengan sumber daya yang terbatas, kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas. Karena penggunaan teknologi, negara-negara yang telah berkembang pesat dapat mengungguli negara-negara yang berkembang.

e) Faktor Sosial dan Politik

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh faktor budaya seperti adat istiadat, tradisi, nilai, dan kepercayaan yang unik di setiap negara. Iklim politik suatu negara berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Memiliki lingkungan politik yang stabil sangat penting bagi kemampuan suatu negara untuk berjalan dengan lancar, membuat warganya Bahagia, dan meningkatkan *output*.

2.1.6 Panjang Jalan

2.1.6.1 Infrastuktur

Infrastruktur merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembangunan ekonomi yang berperan sebagai penyedia layanan dasar bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi maupun sosial. Keberadaan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pendukung, tetapi juga sebagai faktor utama yang menentukan tingkat efisiensi dan produktivitas suatu

perekonomian. Dalam konteks pembangunan, infrastruktur menjadi penghubung antarwilayah yang memungkinkan terjadinya distribusi barang, jasa, serta mobilitas tenaga kerja secara lebih efektif.

Menurut Todaro (2011 dalam Widodo et al., 2022) Infrastruktur adalah fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan ekonomi dan pasar seperti jaringan transportasi, komunikasi dan distribusi, utilitas, air, saluran ketersediaan energi. Definisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki peran strategis dalam menunjang berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Infrastruktur juga berpengaruh terhadap peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses terhadap lapangan kerja. Selain itu, pembangunan infrastruktur turut berkontribusi dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mendukung stabilitas makroekonomi, seperti keberlanjutan fiskal, perkembangan pasar kredit, serta dinamika pasra tenaga kerja. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dapat dikategorikan sebagai *public service obligation*, yaitu kewajiban pemerintah dalam menyediakan prasarana publik yang esensial bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Maqin (2011 dalam Widodo et al., 2022) menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi serta menjadi prasyarat penting bagi berjalannya roda perekonomian secara optimal. Dengan kata lain, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi tidak dapat berkembang secara maksimal.

Bank Dunia mengklasifikasikan infrastruktur ke dalam tiga kategori utama, yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan infrastruktur administratif.

Pertama, infrastruktur ekonomi merupakan infrastruktur yang secara langsung mendukung kegiatan perekonomian, seperti jalan, irigasi, bendungan, listrik, air, pelabuhan, dan bandara. Kedua, infrastruktur sosial mencakup fasilitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, dan sarana rekreasi. Ketiga, infrastruktur administratif merujuk pada sistem yang mendukung pelaksanaan hukum, pengendalian administratif, serta harmonisasi sosial dan budaya.

2.1.6.2 Infrastruktur Jalan

Salah satu bentuk infrastruktur ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan adalah infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan dapat diukur melalui panjang jalan, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang dinyatakan dalam satuan kilometer (km). Panjang jalan mencerminkan tingkat ketersediaan jaringan transportasi darat yang menghubungkan antarwilayah. Keberadaan infrastruktur jalan memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan tersedianya jaringan jalan yang memadai, biaya transportasi dapat ditekan sehingga proses produksi dan distribusi menjadi lebih efisien. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing ekonomi suatu wilayah. Menurut Andriany & Qibthiyyah (2018), infrastruktur ekonomi merupakan konsep yang mencakup berbagai input eksternal yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, baik melalui peningkatan produktivitas maupun penyediaan fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, jalan sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi memiliki orientasi utama

untuk mendukung aktivitas produktif, khususnya dalam pergerakan barang dan jasa.

Secara umum, jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam sistem transportasi darat. Fungsi utama jalan adalah sebagai penghubung antarwilayah yang memungkinkan terjadinya mobilitas manusia dan distribusi barang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dijelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, maupun di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Infrastruktur jalan merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dengan tersedianya jalan yang baik akan memudahkan distribusi barang dan orang, sehingga biaya distribusi lebih rendah dan harga dapat bersaing dipasaran (Iqbal., et al., 2019 dalam Widodo et al., 2022). Keberadaan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Kelancaran transportasi darat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas panjang jalan yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya (Widodo et al., 2022).

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memegang peran penting sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk melihat perkembangan temuan yang telah ada, mengidentifikasi celah penelitian yang belum terjawab, serta

menggali ide-ide baru yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam konteks penelitian ilmiah, setiap studi yang dilakukan idealnya berpijak pada hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan pembanding, landasan analitis, sekaligus sumber inspirasi dalam merumuskan pendekatan dan hipotesis penelitian yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan uraian mengenai sejumlah penelitian relevan yang menjadi rujukan dan konteks bagi penelitian yang akan dilakukan:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Yasni & Yulianto (2020). Peran Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (belanja bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi) • Metode data panel	• Independen (derajat desentralisasi fiskal) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi di Pulau Jawa)	Rasio belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	Jurnal Substansi. Vol. 4 No. 1, 2020.
2	Nabila & Laut (2021). Determinan Ketimpangan Pendapatan Provinsi DIY Yogyakarta Tahun 2010-2020.	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (pertumbuhan ekonomi dan belanja bantuan sosial) • Metode analisis data panel	• Independen (derajat desentralisasi fiskal) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	Pertumbuhan ekonomi dan bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY Yogyakarta pada tahun 2010-2020.	Syntax Idea. Vol. 3, No. 8, Agustus 2021.
3	Alamanda (2020). <i>The Effect of Government Expenditure on</i>	• Dependen (ketimpangan pendapatan)	• Independen (derajat desentralisasi fiskal dan	Variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan	INFO ARTHA. Volume 4 No. 01 (2020).

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Income Inequality and Poverty in Indonesia.</i>	• Independen (belanja bantuan sosial) • Metode analisis data panel	pertumbuhan ekonomi) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	pendapatan di 33 Provinsi Indonesia pada tahun 2005-2017.	
4	Anwar et al. (2024). <i>Aids Socical Expenditures, Poverty and Inequality in Time of Covid-19 Pandemic in Indonesia,</i>	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (belanja bantuan sosial) • Metode analisis data panel	• Independen (derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	Variabel belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan baik di pedesaan dan perkotaan.	<i>Planning Malaysia: Journal of the Malaysian Institute of Planner. Volume 22 Issue 4 (2024)</i>
5	Ramdani (2024). Dampak Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial dari APBD Terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (belanja bantuan sosial) • Metode analisis data panel	• Independen (derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	Belanja bantuan sosial berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintahan sebelum Jokowi. Belanja bantuan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintahan Jokowi.	Jurnal Manajemen Perbendaharaan. Volume 5, Nomor 1, 2024.
6	Alamanda (2021). <i>The Effect of Economic Growth on Income Inequality: Panel Data Analysis from Fifty Countries.</i>	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (pertumbuhan ekonomi) • Metode analisis data panel	• Independen (belanja bantuan sosial dan derajat desentralisasi fiskal) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 50 negara yang diteliti pada tahun 2000-2018	INFO ARTHA: Vol. 5 No. 1 (2021)

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Provinsi Pulau Jawa)		
7	Febryansyah & Putri (2025). Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (belanja bantuan sosial)	• Independen (derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi) • Data tahun (2010-2023) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa) • Metode penelitian regresi linier berganda	Variabel belanja bantuan sosial berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 2010-2023	Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner. Vol. 02, No. 01, Tahun 2025.
8	Yuliani et al. (2025). Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (belanja bantuan sosial)	• Independen (derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi) • Metode analisis regresi data panel • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	Belanja bantuan sosial berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2011-2022.	Jurnal Bina Bangsa Ekonomika. Vol. 18, No. 1. Tahun 2024. E-ISSN: 2721-7213.
9	Aditya (2019). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia.	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (derajat desentralisasi fiskal) • Metode analisis data panel	• Independen (belanja bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian 6 Provinsi Pulau Jawa)	Variabel rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb. Vol. 8, No. 2. Tahun 2019.
10	Putri (2024). Pengaruh Pertumbuhan	• Dependen (ketimpangan pendapatan)	• Independen (belanja bantuan sosial	Derajat desentralisasi fiskal dan	Journal of Development Economic and

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ekonomi, Pendidikan, Desentralisasi Fiskal, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan.	• Independen (derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi) • Metode analisis data panel	dan pertumbuhan ekonomi) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	Social Studies. Volume 3 No. 4 Tahun 2024.
11	Kharisma & Hanifah (2020). Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (pertumbuhan ekonomi) • Metode analisis data panel	• Independen (belanja bantuan sosial dan derajat desentralisasi fiskal) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2017.	Jurnal Wacana Kinerja. Volume 23, Nomor 2, November 2020. E-ISSN: 2620-9063.
12	Wijayanti & Aisyah (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Asing, Inflasi, dan Trade Openess Terhadap Ketimpangan di Indonesia Tahun 2000-2020.	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (pertumbuhan ekonomi)	• Independen (belanja bantuan sosial dan derajat desentralisasi fiskal) • Metode analisis regresi data panel • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	Ekonomis: Journal of Economics and Business. Vol. 6 No. 2 (2022).
13	Putri & Hanifa (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Jawa Timur.	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (pertumbuhan ekonomi) • Metode analisis data panel	• Independen (belanja bantuan sosial dan derajat desentralisasi fiskal) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023.	Independent: Journal Of Economics. Volume 4 Nomor 3 2024. E-ISSN: 2798-5008.

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Kiak (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Kesejahteraan Masyarakat terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (pertumbuhan ekonomi) • Metode analisis data panel	• Independen (belanja bantuan sosial dan derajat desentralisasi fiskal) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014-2017.	Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas. Vol. 8, No 2, Hal 137-144.
15	Yasmin & Syofyan (2024). Determinasi Ketimpangan Pendapatan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2019-2023.	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (pertumbuhan ekonomi) • Metode analisis data panel	• Independen (belanja bantuan sosial dan derajat desentralisasi fiskal) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.	Media Ekonomi. Vol. 32 No. 1 April 2024: 45-60.
16	Lahengke et al. (2024). Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (pertumbuhan ekonomi dan panjang jalan) • Metode analisis data panel	• Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 provinsi di Pulau Jawa)	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan panjang jalan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 24 No. 2 Ferbruari 2024: 37-48.
17	Iqbal & Woyanti (2025). Peran Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Infrastruktur dalam Mempengaruhi	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (desentralisasi fiskal dan panjang jalan)	• Independen (belanja bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi) • Data tahun (2020-2024)	Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan. Dan panjang jalan berpengaruh	Majalah Ekonomi dan Bisnis. Vol. 21 No. 2 (2025): 89-106.

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa (2013-2022).	• Metode analisis data panel • Tempat penelitian (6 provinsi di Pulau Jawa)		positif namun tidak signifikan.	
18	Taryn et al., (2024) Menelusuri Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pendapatan di 34 Provinsi Indonesia	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (panjang jalan) • Metode analisis data panel	• Independen (belanja bantuan sosial, derajat desentralisasi fiskal, dan pertumbuhan ekonomi) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	Panjang jalan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	Jurnal Mahasiswa Ekonomik & Bisnis. Vol. 04 No. 02 Mei 2024: 775 – 784.
19	Sigiro (2023) Peran Infrastruktur dalam Memperbaiki Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (Panjang Jalan) • Metode analisis data panel	• Independen (belanja bantuan sosial, derajat desentralisasi fiskal, dan pertumbuhan ekonomi) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	Panjang jalan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	Parahyangan Economic Development. Vol. 02 No. 2: 170 – 183.
20	Cendani & susilo (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.	• Dependen (ketimpangan pendapatan) • Independen (derajat desentralisasi fiskal) • Metode analisis data panel	• Independen (rasio pajak, belanja modal, dan IPM) • Tempat penelitian (5 Kabupaten/Kota DI Yogyakarta)	Derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta.	Journal of Development Economic and Social Studies. Vol. 1 No. 4 Tahun 2022.
21	Asykurunnizza et al. (2025). Determinasi Ketimpangan Pendapatan	• Dependen (ketimpangan pendapatan)	• Independen (belanja bantuan sosial dan derajat	Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 25, No. 1.

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Antar Provinsi di Indonesia: Analisis Panel dengan Pendekatan <i>Fixed Effect Model</i> (2019-2023).	• Independen (pertumbuhan ekonomi) • Metode analisis data panel	• desentralisasi fiskal) • Data tahun (2020-2024) • Tempat penelitian (6 Provinsi Pulau Jawa)	ketimpangan pendapatan.	Tahun 2025: 182-201.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Belanja Bantuan Sosial dengan Ketimpangan Pendapatan

Belanja bantuan sosial memiliki peran strategis dalam menekan tingkat ketimpangan pendapatan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia yang masih dihadapkan pada disparitas ekonomi antarkelompok masyarakat. Hubungan antara belanja bantuan sosial dengan ketimpangan pendapatan yaitu negatif dengan teori yang mendukungnya, teori redistribusi pendapatan (Rosen & Gayer, 2014, dalam Ramdani, 2024). Teori tersebut menjelaskan bagaimana pemerintah menghimpun penerimaan negara melalui pajak yang sebagian besar bersumber dari kelompok berpenghasilan menengah dan tinggi, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Proses ini secara langsung meningkatkan daya beli dan kemampuan ekonomi kelompok rendah, baik melalui bantuan yang bersifat konsumtif sebagai jaring pengaman sosial maupun bantuan produktif yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat ekonomi lemah.

Penelitian Yuliani et al. (2025) menjelaskan bahwa variabel belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian tersebut sejalan dengan Anwar et al. (2024) yang menyatakan bahwa hubungan negatif antara belanja bantuan sosial dengan ketimpangan pendapatan di desa maupun kota.

Peningkatan belanja bantuan sosial berperan penting dalam menurunkan ketimpangan pendapatan karena kebijakan ini secara langsung memperkuat posisi ekonomi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi yang dan keterbatasan akses sumber daya. Tambahan pendapatan atau manfaat ekonomi yang diterima melalui bantuan sosial memiliki dampak yang relatif lebih besar bagi kelompok bawah dibandingkan kelompok atas, sehingga pertumbuhan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah berlangsung lebih cepat dan mendorong penyempitan kesenjangan pendapatan. Selain itu, belanja bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen rentan pada saat terjadi tekanan ekonomi, yang apabila tidak diintervensi berpotensi memperlebar ketimpangan. Dampak belanja bantuan sosial juga tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi turut meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga penerima melalui dukungan terhadap kebutuhan dasar, aktivitas produktif, serta akses pendidikan panjang. Dengan demikian, peningkatan belanja bantuan sosial secara konsisten mendorong pemerataan hasil pembangunan dan berkontribusi terhadap penurunan tingkat ketimpangan pendapatan.

2.2.2 Hubungan Derajat Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan

Pendapatan

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan guna mendorong pembangunan ekonomi. Teori yang mendukung mengenai ini adalah teori desentralisasi fiskal di kemukakan oleh Hayek, Musgrave dan Oates dalam Puspita et al., (2021: 7) yang mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan, mengelola penerimaan dan pengeluaran yang terdesentralisasi akan lebih efisien dari sisi ketersediaan informasi dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Efisiensi alokasi yang dihasilkan dari desentralisasi fiskal berimplikasi pada peningkatan pemerataan akses terhadap layanan publik dan pembangunan ekonomi daerah. Ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola penerimaan serta menentukan prioritas pengeluaran, kebijakan pembangunan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran, terutama untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian, peningkatan derajat desentralisasi fiskal dapat mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan.

Penelitian Aditya (2019) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sejalan dengan penelitian Putri (2024) yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal yang tinggi membuat pemerintah daerah lebih banyak kontrol atas belanja daerah mereka sendiri dan pemerintah dapat menggunakan belanja daerah dengan lebih tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pendekatan penerimaan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lokal, sehingga kapasitas fiskal daerah dapat meningkat dan mendukung pembiayaan program pembangunan yang lebih inklusif. Pendekatan pengeluaran memungkinkan pemerintah daerah mengelola belanja secara lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan masyarakat yang akhirnya dapat mempersempit ketimpangan pendapatan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Sementara itu, pendekatan komprehensif yang menyelaraskan kewenangan penerimaan dan pengeluaran secara simultan menciptakan konsistensi kebijakan fiskal daerah, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah, tetapi memperlebar terhadap kesenjangan pendapatan antarkelompok masyarakat. Negara berkembang seperti Indonesia, laju pertumbuhan yang berbeda antar sektor dan wilayah sering kali menciptakan perbedaan dalam kesempatan memperoleh pendapatan. Hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan ini didukung teori Kuznets (Todaro & Smith, 2020). Teori Kuznets menjelaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak bersifat linier, melainkan mengikuti pola tertentu sepanjang proses pembangunan. Pada Tahap awal pertumbuhan ekonomi, peningkatan aktivitas ekonomi umumnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, khususnya yang memiliki akses lebih besar terhadap modal, teknologi, dan kesempatan ekonomi, sehingga ketimpangan

pendapatan cenderung meningkat. Namun, seiring berjalannya proses pembangunan dan semakin meluasnya akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, serta kebijakan pemerataan, manfaat pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan oleh kelompok masyarakat yang lebih luas.

Penelitian yang dikemukakan oleh Alamanda (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar jurang antara si kaya dan si miskin. Penelitian ini sejalan dengan Kharisma & Hanifah (2020) dan Wijayanti & Aisyah (2022) yang hasilnya menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Kondisi negara berkembang terjadi pada tahap awal pembangunan, kegiatan ekonomi baru umumnya berkembang pada sektor-sektor tertentu yang membutuhkan modal besar, keterampilan tinggi, dan akses jaringan ekonomi yang kuat. Kelompok masyarakat yang telah memiliki modal, pendidikan, serta posisi kerja yang lebih baik akan lebih cepat memanfaatkan peluang pertumbuhan tersebut, sementara kelompok berpendapatan rendah cenderung tertinggal karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, modal usaha, dan kesempatan kerja. Akibatnya, selisih pendapatan antarkelompok masyarakat menjadi semakin lebar. Namun, seiring dengan meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, serta meningkatnya peran pemerintah dalam penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, peluang ekonomi mulai dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang lebih luas, sehingga pertumbuhan ekonomi secara bertahap berpotensi mendorong penurunan ketimpangan pendapatan.

2.2.4 Hubungan Panjang Jalan dengan Ketimpangan Pendapatan

Infrastruktur jalan merupakan salah satu komponen krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Ketersediaan jaringan jalan yang memadai dapat memperlancar mobilitas barang dan manusia, sehingga menekan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing harga di pasar. Selain itu, keberadaan jalan raya dan jembatan berperan dalam membuka keterhubungan antarwilayah, yang pada akhirnya mempermudah masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kelancaran sistem transportasi darat sangat dipengaruhi oleh kualitas serta panjang jaringan jalan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Hubungan negatif antara panjang jalan dengan ketimpangan pendapatan dijelaskan pada teori kapabilitas. Teori kapabilitas Sen memberikan justifikasi teoritis yang kuat mengapa perluasan jaringan jalan berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan. Ketika masyarakat tidak memiliki akses terhadap jaringan jalan yang memadai, kapabilitasnya untuk berfungsi secara ekonomi menjadi sangat terbatas, masyarakat tidak mampu menjangkau pasar untuk menjual hasil produksinya, tidak dapat mengakses lapangan kerja di luar wilayahnya, dan tidak mampu memanfaatkan layanan publik yang tersedia di pusat kota.

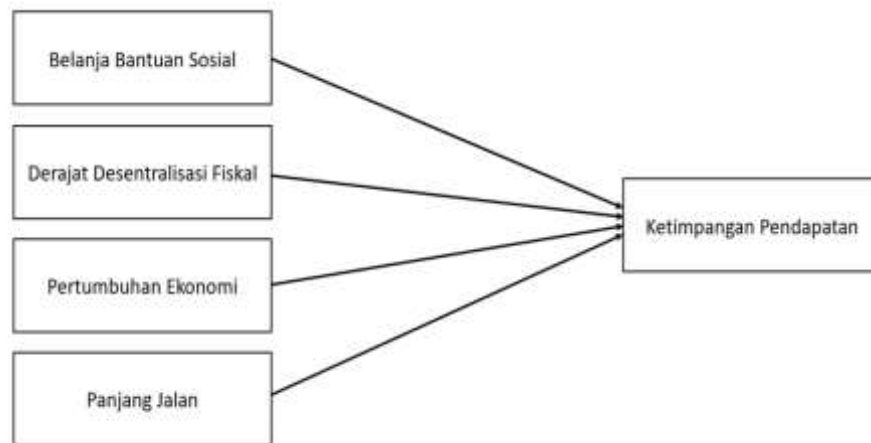
Konsep kapabilitas Amartya Sen juga berhubungan dengan kemiskinan, di mana Sen memahami orang miskin bukan sebagai orang yang berpendapatan rendah, melainkan sebagai orang yang kehilangan kapabilitas, sehingga tolok ukur kualitas hidup seseorang bukan dilihat dari pendapatannya, tetapi dilihat sejauh mana seseorang memiliki kemampuan untuk mencapai sesuatu. Dengan demikian,

perluasan infrastruktur jalan yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi secara langsung memperluas kapabilitas masyarakat berpendapatan rendah untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sigiyo (2023) menyatakan bahwa panjang jalan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan adanya peningkatan infrastruktur jalan akan meningkatkan jaringan distribusi, transportasi, dan lain-lain, untuk memudahkan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara merata. Penelitian ini sejalan dengan Taryn et al. (2024) yang menyatakan bahwa panjang jalan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai memiliki peran strategis dalam menekan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan aksesibilitas ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Jalan sebagai barang publik memungkinkan setiap individu untuk terhubung dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, sehingga hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala utama bagi kelompok berpendapatan rendah dapat diminimalkan. Dengan tersedianya jaringan jalan yang baik, masyarakat di wilayah terpencil maupun pinggiran memperoleh peluang yang lebih besar untuk mengakses pasar, memperluas distribusi hasil produksi, serta menjangkau lapangan kerja di wilayah lain yang lebih produktif. Selain itu, infrastruktur jalan juga meningkatkan kelancaran mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja sehingga aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara lebih efisien. Kondisi tersebut mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses ekonomi, sehingga pada akhirnya

berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan pendapatan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat.



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji hubungan antara belanja bantuan sosial, derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan panjang jalan terhadap ketimpangan pendapatan. Hubungan antarvariabel tersebut selanjutnya dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran yang disajikan pada gambar 2.3.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang disusun sebagai jawaban awal permasalahan penelitian. Pernyataan ini bersifat tentatif dan harus dapat diuji secara empiris, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan melalui data yang dikumpulkan dalam proses penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dijealskan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Diduga belanja bantuan sosial, derajat desentralisasi fiskal, dan panjang jalan berpengaruh negatif, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh

positif secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2020-2024.

2. Diduga belanja bantuan sosial, derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan panjang jalan secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2020-2024.